

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(L K P J)**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Rimbo Panjang - Salido Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dra. RIO FATMA ERNI, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

Jabatan : BUPATI PESISIR SELATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

Painan, 27 Februari 2017

Pihak Pertama

KEPALA DINAS SOSIAL PprPA
KAB. PESISIR SELATAN

dto

Dra. RIO FATMA ERNI, M.M.
NIP. 19610424 198210 2 003

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. URUSAN WAJIB

Gambaran Umum Bidang Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat, melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang diwujudkan dalam kegiatan penanganan masalah-masalah sosial terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan, namun beberapa masalah masih harus mendapat perhatian.

Tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial diantaranya memelihara, membimbing dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial, memupuk, dan meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab sosial masyarakat serta melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Usaha-usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi bantuan sosial baik bagi perseorangan maupun kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban bencana, memelihara taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial, melakukan bimbingan, pembinaan, rehabilitasi sosial termasuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, serta melaksanakan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotongroyongan.

Pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat diperkirakan akan menghasilkan berbagai jangkauan pelayanan dan pemberdayaan sosial yang lebih luas bagi anak terlantar, termasuk di dalamnya anak jalanan dan anak cacat, serta pemberian santunan bagi lanjut usia terlantar, telah meningkatnya jumlah keluarga fakir miskin dan PMKS lainnya yang diberdayakan, sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam hal kualitas perlindungan dan jaminan sosial, termasuk pengembangan

sistemnya, diharapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi masih diwarnai dengan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterpencilan, korban tindak kekerasan, akibat bencana alam dan bencana sosial, penyalahgunaan napza dan penyimpangan perilaku yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, permasalahan aktual yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial, kesenjangan sosial, perlu pula memperoleh perhatian dan penanganan yang serius.

Permasalahan-permasalahan ini perlu ditangani secara serius untuk menghindarkan kemiskinan struktural, perilaku anti sosial, kondisi disharmoni, kerawanan sosial dan tindak kejahatan yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Hal ini akan menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah bertekad untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dengan melaksanakan berbagai program/kegiatan bidang sosial dan meningkatkan koordinasi lintas sektor serta meningtkkan kerjasama baik dengan pemerintah pusat, propinsi maupun Kabupaten/Kota.

B. Program dan Kegiatan.

Urusan : SOSIAL

SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATA	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
13	URUSAN SOSIAL			
	1. DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1 PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN	530,839,124	511,515,056	96,36
	1 Penyed. J.Komunikasi, sumber daya air & listrik	13,350,000	3,589,406	26,89
	2 Peenyediaan Jasa Administrasi Keuangan	75,851,400	75,041,200	98,93

1	2	3	4	5
	3 Penyediaan Jasa kebersihan kantor	101,580,200	101,548,900	99,97
	4 Penyediaan alat tulis kantor	34,998,224	33,788,288	96,54
	5 Penyed. Barang cetak dan penggandaan	29,639,300	25,899,250	87,38
	6 Penyed.Komp.Instl. listrik/penerangan kantor	8,675,000	7,682,500	88,56
	7 Penyed. Bhn.bacaan &peraturan per-undang2an	11,320,000	10,320,000	91,17
	8 Penyediaan makanan dan minuman	17,925,000	17,050,000	95,12
	9 Rapat2 koordinasi & konsultasi ke luar daerah	172,450,000	171,545,512	93,73
	10 Rapat2 koordinasi & konsultasi dalam daerah	65,050,000	65,050,000	100
	2 Progr. Peningk. Sarana &Prasarana Aparatur	620,437,900	598,739,138	96,50
	1 Pengadaan Peralatan Gedung kantor	253,365,000	241,931,500	95,49
	2 Pengadaan Mobiller kantor	76,234,500	74,860,000	98,20
	3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	90,000,000	88,151,500	97,95
	4 Pemel.rutin/berkala kendaraan dinas/operasio.	191,038,400	185,946,138	97,33
	5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9,800,000	7,850,000	80,10
	3 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	45,000,000	44,866,354	99,70
	1 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan per-undang2an	45,000,000	44,866,354	99,70
	4 Progr. Pemberd. Fakir Miskin KAT dan Penyandang Masalah Kesejah.Sosial lainnya	87.943.260	68.374.260	80,48
	1 Penunjang Operasional Prog, Keluarga Harapan	92,819,460	84,817,418	77,75
	2 Pelayanan orang terlantar di perjalanan	117,075,980	68,413,830	58,44
	3 Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan	80,635,520	59,287,550	73,53
	4 Monitoring dan Evaluasi Data PBI APBD/APBN	40,027,400	38,329,900	95,76
	5 Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin	25,768,440	21,188,440	82,23
	6 Pemutakhiran Data KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial)	108,339,800	101,932,104	94,09
	5 Progr. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	157.085.480	138.041.480	96,78
	1 Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	93.366.900	90.358.150	96,78
	6 Prog. Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	79.053.040	77.291.400	97,77
	1 Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat	79.053.040	77.291.400	97,77

1	2	3	4	5
	7 Prog.Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	471.981.430	403.422.680	85,47
	1 Penyediaan Bahan Sembako Anak Panti	471.981.430	403.422.680	85,47
	8 Prog.Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	240.190.880	226.166.680	85,24
	1 Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan	240.190.880	226.166.680	94,16
	9 Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan	228.838.470	196.344.200	85,80
	1 Sarasehan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda	109.216.320	81.351.200	74,49
	2 Pemeliharaan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan dan MPN H.Ilyas Yacub	119.622.150	114.993.000	96,13

C. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 1.578.097.320,- terealisasi sebesar Rp. 1.367.552.352,- atau 86,66 %

Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Keg. Jasa Listik, Jasa adm Kdeuangan, ATK, cetak dan Penggandaan, makan minum, Perjalanan Dinas dll)

Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor serta memperlancar kegiatan administrasi perkantoran dalam rangka mempercepat kelancaran Administarsi dan Pelayanan di Kantor. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 530.839.124,- realisasi sebesar Rp. 511.515.056,- atau 96,36%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Keg. Pengadaan Peralatan gedung kantor, pengadaan mobiller, pemeliharaan gedung kantor, Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasonal, pemeliharaan peralatan dan rehabilitasi sedang berat gedung Kantor)

Program ini bertujuan untuk melengkapi sarana dan prasarana aparatur supaya dapat melaksanakan tugas / kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan karena sudah dilengkapi dengan peralatan yang memadai dengan anggaran sebesar Rp. 620.437.900,- terealisasi sebesar Rp. 598.739.138,- (96,50%).

3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Keg.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per undang-undangan).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para aparatur dalam melaksanakan tugasnya melalui bintek- bintek dan pelatihan dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- terealisasi Rp. 44.866.354,- (99,70%).

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT & PMKS lainnya

Kegiatan Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan

Program ini bertujuan menyediakan kebutuhan operasional Sekretariat PKH serta tersedia bantuan biaya transfor untuk pendamping disetiap Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp. 92.819.460,- realisasi sebesar Rp. 84.817.418,- atau 91,38%.

Hasil dari program ini adalah meningkatnya kesehatan ibu hamil dan balita serta termotifasinya anak untuk sekolah.

Dampak dari program ini adalah terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas, terutama PMKS penerima manfaat program PKH.

Kegiatan Pelayanan Orang Terlantar di Perjalanan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan biaya operasional orang terlantar, mayat terlantar dan pembayara BPJS ODGJ, dengan anggaran sebesar Rp. 117.075.980,-, realisasi sebesar Rp. 68.413.830,- atau 58,44%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tertanggulangnya orang terlantar, mayat terlantar dan ODGJ.

Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan terhadap orang terlantar, mayat terlantar dan ODGJ.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi data PBI APBD/APBN

Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi data penerima PBI APBD, dengan anggaran sebesar Rp. 40.027.400,- realisasi sebesar Rp. 38.329.900,- atau sebesar 95,76%. Hasil dari kegiatan ini adalah terverifikasinya data penerima PBI APBD.

Dampak dari kegiatan ini adalah tersedianya data penerima PBI APBD yang sudah diverifikasi.

Kegiatan Pendampingan KUBE Fakir Miskin

Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan KUBE Fakir Miskin, dengan anggaran sebesar Rp. 25.768.440,- realisasi sebesar Rp. 21.188.440,- atau sebesar 82,23%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya penerima bantuan KUBE Fakir Miskin.

Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemanfaatan bantuan KUBE Fakir Miskin.

Kegiatan Pemutakhiran Data KKS (Kartu Kesejahteraan Keluarga)

Kegiatan ini bertujuan untuk memutakhirkan data penerima bantuan dengan KKS (Kartu Kesejahteraan Keluarga), dengan anggaran sebesar Rp. 108.339.800,- realisasi sebesar 11.932.104,- atau sebesar 94,09%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data KKS yang telah dimutakhirkan. Dampak dari kegiatan ini adalah tercapainya bantuan yang tepat sasaran.

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap kejadian luar biasa berupa bencana alam dan bencana sosial. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.79.053.040,- dan realisasi sebesar Rp. 77.291.400,- (97,77%).

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya penanganan bencana alam dan bencana sosial. Dampak dari kegiatan ini adalah tercapainya penanganan tanggap darurat tentang kejadian luar biasa berupa bencana alam dan bencana sosial.

6. Program Pembinaan para Penyandang Cacat Trauma.

Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat.

Program ini bertujuan untuk menyediakan keperluan operasional untuk pendamping para penerima bantuan jaminan Sosial penyandang cacat berat disetiap kecamatan serta menyediakan uang transportasi dan akomodasi para pendamping dalam rangka pertemuan di Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp 79.053.040,- dan realisasi sebesar Rp. 77.291.400,- atau 97,77 %.

Hasil dari Program ini adalah tersedianya keperluan penyandang cacat berat penerima jaminan sosial pusat. Dampak dari program ini adalah terbinanya para cacat berat penerima jaminan Sosial Pusat.

7. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.(Keg. Penyediaan Sembako anak Panti.

Program ini bertujuan untuk menyediakan bahan Sembako bagi anak panti sebanyak 9 Panti dengan jumlah anak 235 orang selama 3 bulan serta biaya operasional lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 136.774.980,- realisasi sebesar Rp. 135.962.980,- atau 99,4 %

Hasil dari Program ini adalah tersedianya kebutuhan sembako bagi anak dalam panti asuhan. Dampak program ini adalah terbinanya panti asuhan di Pesisir Selatan.

8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan SDM Pengelola LKKS dengan anggaran sebesar Rp. 240.190.880,- terealisasi sebesar Rp. 226.166.680,- atau sekitar 94,16 %

Hasil dari Program ini adalah meningkatnya SDM pengelola LKKS. Dampak dari Program ini adalah meningkatnya kualitas kelembagaan sosial di Pesisir Selatan.

9. Program Penanaman Nilai – Nilai Kepahlawanan dan Keberintisan

Keg. Sarasehan Penanaman Nilai Nilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan generasi muda terhadap sejarah perjuangan dalam merebut kemerdekaan, serta menghormati dan menghargai para pahlawan kita baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup dengan anggaran sebesar Rp. 109.216.320,- realisasi sebesar Rp. 81.351.200,- atau sekitar 74,49 %

Hasil dari program ini adalah meningkatnya pengetahuan generasi muda tentang nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan melalui sarasehan.

Dampak program ini adalah terciptanya generasi yang menghargai nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan.

Keg. Pemeliharaan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan.

Program ini bertujuan untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan yang berlokasi di Desa Sago Kecamatan IV Jurai dan Makam Pahlawan Nasional yang berlokasi di Kecamatan Bayang dengan anggaran sebesar Rp. 119.622.150,- realisasi sebesar Rp. 114.993.000,- atau 96,13 %

Hasilnya adalah terpelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional Ilyas Yacub. Dampaknya adalah lestari nilai-nilai kepahlawanan berupa makam pahlawan.

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.

Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah keterlambatan dalam pelaksanaannya sehingga tidak sesuai dengan pelaksanaan yang telah direncanakan, tapi kalau permasalahan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tidak semua kelompok masyarakat yang dapat dilayani mengingat keterbatasan keuangan pemerintah daerah.
- b. Kabupaten Pesisir Selatan termasuk salah satu daerah rawan bencana di Sumatera Barat yang hampir setiap tahun mengalaminya, maka perlu persiapan bantuan kepada korban bencana dan diperlukan perhatian dan penanganannya secara khusus.

Solusi atau tindakan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Memperluas Jangkauan Pelayanan peningkatan kemampuan keterampilan bagi masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri
- b. Meningkatkan potensi dan partisipasi PSKS.
- c. Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- d. Mengayomi masyarakat dari ancaman bencana dan pasca bencana.

1. URUSAN WAJIB

A. Gambaran Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan dengan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini coba diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penyusunan Dokumen Anggaran Responsif Gender dan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak.

B. Program dan Kegiatan.

Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SKPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
14	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1. DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN/ NAGARI	443.299.700	368.290.022	83,08
	1 Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten	279.393.760	234.689.514	97,98
	2 Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan Kabupaten	113.459.120	99.982.208	88,12
	3 Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten	50.446.820	33.618.300	66,64
	2 PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	232.701.200	209.870.120	90,19
	1 Pembinaan Nagari Sayang Anak	150.666.640	149.307.060	99,10
	2 Fasilitasi Pengembangan P2TP2A	82.034.560	60.563.060	73,83
	3 Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah	264.324.720	238.967.625	90,41
	1 Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak.	92.256.190	89.289.340	96,78
	2 Penyusunan Anggaran Responsif Gender	72.068.790	67.026.765	93,00
	3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	99.999.740	82.651.520	82,65

C. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN**1. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Nagari**

Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten, Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Dharmawanita Persatuan Kabupaten dan Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten

Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelembagaan GOW, Dharmawanita Persatuan dan BKMT. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 443.299.700,- realisasi sebesar Rp. 368.290.022,- atau 83,08 %

Hasil dari program ini adalah meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam organisasi kewanitaan GOW, DWP dan BKMT.

Dampak program ini adalah meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui kelembagaan perempuan.

2. Program Perlindungan Anak

Kegiatan Pembinaan Nagari Sayang Anak dan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program ini bertujuan untuk mempersiapkan nagari layak anak menuju kabupaten layak anak dan fasilitasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 232.701.200,- realisasi sebesar Rp. 209.870.120,- atau sekitar 90,19%.

Hasil dari program ini adalah terpenuhinya hak anak dan terfasilitasinya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dampak dari program ini adalah meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dan tercapainya prediket Kabupaten Layak Anak.

3. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak, Kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender dan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Program ini bertujuan untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan pembentukan regulasi daerah tentang penyelenggaraan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 264.324.720,- realisasi sebesar Rp. 238.967.625,- atau sekitar 90,41 %.

Hasil dari program ini adalah terciptanya regulasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dampaknya adalah terciptanya kesetaraan gender dalam pembangunan.

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program diatas adalah kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang isu Pengarusutamaan Gender dan Penganggaran Responsif Gender pada masing-masing Perangkat Daerah sehingga tujuan program ini belum maksimal dicapai.

Sedangkan solusi yang diperlukan adalah Perlunya komitmen pimpinan untuk pengarusutamaan gender dalam pembangunan, sehingga kesetaraan gender dapat dicapai.